

KEBIJAKAN NEGARA DAN SENTIMEN ANTI-CINA: PERSPEKTIF HISTORIS

Oleh: Ririn Darini¹

Abstrak

Warga Negara Indonesia etnis Cina sebagaimana WNI dari etnis lain merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Tetapi apabila dibandingkan dengan nasib rakyat Indonesia lainnya nasib WNI etnis Cina secara politis kurang beruntung. Dalam masyarakat Indonesia juga berkembang mitos dominasi ekonomi oleh etnis Cina sehingga akibat mitos tersebut mereka seringkali menjadi sasaran kecemburuan.

Setiap gejolak sosial yang terjadi di negeri ini hampir selalu melibatkan etnis Cina sebagai korbannya. Sentimen anti-Cina bila dilihat dari sejarahnya memang telah lama ada. Hal ini sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa.

Pendahuluan

Sejarah kehidupan etnis Cina di Indonesia selalu diwarnai dengan peristiwa kekerasan, dari diskriminasi sampai kekerasan fisik seperti perampokan, pembunuhan, penjarahan, dan pemerkosaan. Hampir dalam setiap pergantian periode di Indonesia etnis Cina menjadi korban kekerasan dalam sentimen anti Cina, misalnya peristiwa pembantaian di Muara Angke pada masa VOC dengan korban lebih dari 10.000 orang Cina yang dibantai atas perintah pemerintah VOC², peristiwa kerusuhan Maret 1942³, peristiwa September 1965⁴ dan yang masih melekat dalam ingatan adalah peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 di

¹ Penulis adalah staf pengajar pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.

² Hembing Wijayakusuma, *Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005).

³ Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, terj. Apri Dananto, (Yogyakarta: Niagara, 2004).

⁴ Kekerasan anti-Komunis yang menyelimuti kudeta 30 September 1965 berubah menjadi gerakan anti-Cina yang kuat sampai akhir tahun 1966.

Jakarta dan beberapa kota lainnya merupakan salah satu contoh peristiwa malapetaka terbesar yang dialami oleh orang-orang keturunan Cina di Indonesia setelah masa kemerdekaan.

Adanya sentimen anti-Cina yang bermuara pada kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Cina di Indonesia tidak terlepas dari sentimen sosial dan kesenjangan ekonomi.⁵ Sentimen sosial berjalan seiring dengan masalah kesenjangan ekonomi. Di balik sentimen ini terdapat prasangka-prasangka yang terus menerus hidup dan bahkan sengaja dihidupkan dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh pada zaman penjajahan Belanda, prasangka ini terkait dengan masalah politik. Etnis Cina distigmatisasi sebagai antek Belanda, dan prasangka ini terus bertahan sampai masa awal kemerdekaan Indonesia. Terdapat penggeneralisasian sifat ini bagi semua warga Cina, padahal terdapat juga kalangan Cina yang bersimpati terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia.

Prasangka yang ada juga muncul akibat keunggulan kalangan Cina dalam memenangkan persaingan ekonomi. Keunggulan ekonomi warga etnis Cina memberikan dampak munculnya kecemburuan dan kebencian etnis lain yang pada akhirnya melahirkan prasangka-prasangka. Gambaran umum mengenai etnis Cina di Indonesia yang ada selama ini adalah stigma bahwa golongan Cina merupakan “binatang ekonomi” (*economic animal*) yang bersifat oportunistik, tidak memiliki loyalitas politik dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri.⁶ Mitos-mitos tentang karakter-karakter orang Indonesia keturunan Cina sampai saat ini masih tertanam kuat dalam masyarakat kita, bahkan mungkin dalam kesadaran bangsa Indonesia keturunan Cina itu sendiri. Banyak tekanan terhadap warga negara etnis Cina yang berasal dari prasangka bahwa secara ekonomi mereka kuat,⁷ tidak loyal

⁵ Lihat Rene L Pattiradjawane, “Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia, dalam I. Wibowo (ed.), *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 250-252.

⁶ Didi Kwartanada, “Minoritas Cina dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945”, Lembaga Studi Realino (ed.), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Cina*, (Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino, 1996).

⁷ Sedemikian suksesnya ekonomi mereka sehingga muncul pendapat bahwa orang etnis Cina saat ini telah menguasai ekonomi Indonesia, bahwa 3%

kepada Indonesia dan siap beremigrasi ke negara mana pun yang menawarkan keuntungan ekonomi kepada mereka.

Sebenarnya apakah yang salah dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mitos-mitos dan prasangka-prasangka itu bisa terus hidup dan tertanam lekat dalam benak kita sampai sekarang. Lestari dan berkembangnya sentimen anti Cina tidak terlepas dari kebijakan negara. Negara, dalam hal ini pemerintah, merupakan suatu institusi yang selalu mereproduksi isu-isu rasial demi mempertahankan *status quo*.⁸ Sejak zaman penjajahan Belanda, penguasa telah menerapkan kebijakan segregasi sosial terhadap etnis Cina. Langsung atau tidak langsung negara memelihara stereotip-stereotip itu dan memanipulasinya untuk mempertahankan kekuasaannya. Tulisan ini akan berusaha menelaah beberapa kebijakan negara kolonial sampai pemerintahan Orde Baru terhadap etnis Cina yang cenderung berpotensi untuk lahirnya sentimen anti-Cina.

Kebijakan Pemerintah Kolonial

Berabad-abad lamanya, orang-orang Cina dari berbagai propinsi sebelah tenggara Cina telah mulai pindah menetap di kepulauan Indonesia. Tekanan ekonomi dalam negeri Cina telah memaksa orang Cina merantau ke Asia Tenggara. Pada abad ke-18 VOC menarik orang Cina khususnya yang berada di Banten ke kota Batavia dengan suatu janji ada keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh orang Cina dari kota dagang tersebut, dan memang tidak bisa dibantah bahwa orang Cina memperoleh keuntungan besar di daerah ini. Lambat laun kehadiran mereka bukan lagi sekedar penghuni kota tetapi sebagai saingan VOC.

warga etnis Cina menguasai 70% perekonomian Indonesia. I Wibowo, "Pengantar", dalam I. Wibowo (ed.), *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. Xv.

⁸ Lihat Ariel Heryanto, "Kapok Jadi Nonpri: Terorisme Negara dan Isu Rasial", *Kompas*, 12 Juni 1998.

Untuk mengatasinya pada bulan Oktober 1740 pemerintah melakukan pembantaian orang-orang Cina di Batavia.⁹

Selanjutnya Pemerintah Kolonial banyak mengeluarkan kebijakan yang membatasi gerak langkah orang-orang Cina di Hindia Belanda. Peraturan-peraturan pemerintah kolonial Belanda tersebut bersifat diskriminatif. Sejak bulan Nopember 1740 orang-orang Cina dikonsentrasikan dalam suatu permukiman tertentu yang disebut “Pecinan”. Aturan yang disebut *Wijkenstelsel* tersebut dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang diundangkan dan diberlakukan kembali dari waktu ke waktu pada tahun 1835, 1854, 1866, dan 1871. Selain menerapkan *wijkenstelsel* VOC juga menerapkan *passenstelsel* atau surat jalan untuk menghambat gerak orang-orang Cina. Pada tahun 1870 keluar Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet* 1870) yang melarang orang Cina memiliki tanah.

Dalam sistem kolonialisme yang memiliki *color-line* sebagai ciri universalnya, negara kolonial menggolongkan penduduk dalam tiga golongan penduduk berdasarkan ras untuk mengisolasi satu golongan dengan golongan yang lain, yaitu golongan Eropa di lapisan paling atas, golongan Timur Asing (Arab, Cina, dll) di lapisan kedua, dan penduduk bumiputera di lapisan ketiga. Penggolongan penduduk ini merupakan bagian dari politik pecah belah pemerintah kolonial, yang telah memperkuat perasaan segolongan. Kebijakan ini juga telah memunculkan perasaan rasialisme di kalangan pribumi.

Di bidang ekonomi pemerintah kolonial menempatkan etnis Cina dalam posisi dominan. Mereka dimanfaatkan sebagai perantara (*middlemen*) ekonomi atau yang biasa disebut sebagai pedagang perantara antara pihak Belanda dengan masyarakat pribumi. Posisi sebagai perantara ini semakin diperkuat dengan diperkenalkannya Sistem Tanam Paksa oleh pemerintah kolonial. Sejak awal

⁹ VOC merasa takut dengan perkembangan jumlah etnis Cina yang begitu cepat di Batavia sehingga menyaingi VOC dalam bisnis di Batavia. Hal ini merupakan salah satu sebab meletusnya pembantaian terhadap orang Cina di Batavia. Dalam peristiwa tersebut diperkirakan 10.000 orang etnis Cina meninggal. Pembunuhan tersebut berlangsung selama delapan hari. Lebih lanjut lihat Hembing Wijayakusuma. Orang-orang Cina yang lolos dari pembantaian kemudian menyelamatkan diri ke Jawa Tengah.

mereka telah terlibat dalam kegiatan tanam paksa, misalnya dalam hal industri gula. Dalam hal pengolahan tebu menjadi gula dibutuhkan partisipasi pihak swasta yang biasanya melibatkan orang-orang Cina berdasarkan kontrak dari pemerintah. Belanda menggunakan orang-orang Cina untuk melancarkan roda eksploitasi kolonial melalui peran mereka sebagai perantara dan pengawas.

Pemerintah kolonial menyadari bahwa lebih sedikit resikonya bila memberikan sebagian kekuasaan ekonomi kepada golongan Cina daripada diserahkan kepada golongan pribumi. Peran sebagai pedagang perantara memungkinkan etnis Cina untuk terus berkecimpung dalam bisnis dan distribusi kebutuhan sehari-hari yang juga dikontrol oleh pemerintah Kolonial. Usaha dagang seperti pengeceran-penjualan candu, jual-beli garam, pemungutan cukai jalan atau jembatan dan sebagainya kebanyakan berada di tangan orang-orang Cina setelah mereka berhasil memenangkan pelelangan untuk memperoleh monopoli hak usahanya.¹⁰ Dengan posisinya yang demikian orang-orang Cina akan berhadapan secara langsung dengan penduduk lokal.

Pemerintah kolonial telah mengkondisikan persaingan ekonomi secara tidak sehat antara penduduk bumiputera dengan orang-orang Cina, sehingga mereka beranggapan bahwa persaingan ekonomi ini harus disiasati dengan gerakan yang berbau rasialis. Menurut W.F. Wertheim, persaingan ekonomi merupakan akar ketegangan antara etnis Cina dengan Indonesia lokal. Konflik terjadi ketika pedagang santri Islam mulai bercita-cita untuk berperan dalam perdagangan yang semula dipandang rendah di kalangan santri Islam. Oleh karena itu kemudian didirikan Sarekat Dagang Islam yang tidak lepas dari semangat persaingan akibat berdirinya Kamar Dagang Tionghoa (*Siang-hwee*).¹¹

¹⁰ Budi Susanto, SJ, "Rekayasa Kekuasaan Ekonomi (Indonesia 1800-1950): Siasat Pengusaha Tionghoa", dalam Lembaga Studi Realino (ed.), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 18.

¹¹ Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 57.

Kebijakan Pemerintah Orde Lama

Pemerintah Indonesia yang dibentuk setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1950 pada dasarnya mewarisi kebijakan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah membiarkan warga Cina terus aktif di bidang ekonomi sambil membatasi keberadaan mereka sebagai pejabat di bidang birokrat. Namun warga Cina dibolehkan dalam bidang politik sehingga terdapat sebagian warga Cina yang menduduki jabatan sebagai menteri, misalnya Lie Kiat Teng sebagai Menteri Kesehatan dan Oey Tjoe Tat sebagai menteri pada kabinet 100 menteri.

Pemerintahan Soekarno juga membolehkan etnis Cina mengekspresikan kebudayaan mereka dan menjalankan agama atau keyakinan mereka. Namun demikian segregasi tetap terjadi karena dalam kenyataannya tidak ada interaksi yang efektif antara warga etnis Cina dengan warga etnis lainnya. Akibatnya beberapa konflik serius terjadi. Masalah utamanya adalah kesenjangan kemakmuran.

Beberapa tokoh nasionalis di bawah Mr. Asaat pernah memperkenalkan sebuah program ekonomi yang disebut benteng, yang intinya ingin meningkatkan partisipasi ekonomi warga pribumi dalam ekonomi nasional.¹² Sistem ini diberlakukan untuk melindungi para importir nasional agar dapat bersaing dengan asing yang masih beroperasi di Indonesia. Tujuan dari sistem benteng ini adalah agar terbentuk kelompok wiraswasta Indonesia yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Program ini memberikan hak kepada pengusaha pribumi untuk mendapatkan lisensi dan kredit impor. Sebenarnya pada pemerintahan Soekarno ini justru meminimalisir kebijakan ekonomi-politik sebagai pemicu segregasi sosial yang akan mengarah pada munculnya sentimen anti-Cina. Tetapi target ini tidak tercapai dan hanya dimanfaatkan oleh sekelompok elit politik untuk menumpuk kekayaan pribadi atau menghimpun dana-dana politik, bahkan melahirkan sebuah bentuk kerjasama “Ali-Baba”.¹³ Dalam kerjasama model ini

¹² Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Cina dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 312.

¹³ Perusahaan secara resmi seolah-olah dimiliki oleh pribumi atau si Ali (pengusaha pribumi yang tidak berpengalaman tetapi memegang ijin/kekuasaan),

pihak Indonesia asli yang tidak berpengalaman menjual ijin dan lisensi kepada pedagang warga etnis Cina. Dengan cara ini orang Cina tetap mampu melanjutkan usahanya dan mendapatkan keuntungan, sementara mitra Indonesia asli hampir tidak mendapatkan pengalaman bisnis yang diperlukan bagi pengembangan ekonomi nasional.

Pada era pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang dianggap diskriminatif di bidang ekonomi yaitu PP no. 10/November 1959 yang melarang orang Cina berdagang di wilayah pedesaan yang melahirkan sejumlah insiden. Peraturan ini membatasi secara tegas peran dan hak ekonomi etnis Cina. Mereka hanya diperbolehkan berdagang sampai tingkat kabupaten dan tidak boleh berdagang di tingkat kecamatan apalagi di desa-desa. Implikasinya, orang-orang di berbagai daerah dilarang dan dipaksa untuk meninggalkan permukimannya di pedesaan. Sekalipun larangan ditujukan kepada WNA Cina totok, dalam prakteknya pembedaan dengan mereka yang peranakan tidak secara jelas diberlakukan. Selama tahun 1959-1960 kampanye pengusiran berlangsung dengan dukungan pihak TNI-AD. 136.000 orang Cina meninggalkan Indonesia, sementara 100.000 orang di antaranya pulang ke tanah leluhur Tiongkok.¹⁴

Kerusuhan anti-Cina tahun 1963 terjadi di berbagai daerah terutama di Jawa Barat yaitu di Cirebon, Bandung, Sumedang, Bogor, Cipayung, Tasikmalaya, Garut, Singaparna, dan Sukabumi. Selain itu kerusuhan juga terjadi di Solo, Surabaya, Malang, dan Medan. Kerusuhan terjadi akibat kesenjangan kemakmuran. Etnis Cina terkena imbas dari situasi politik-ekonomi saat itu, yaitu inflasi yang melonjak tinggi, kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, frustrasi terhadap kebijakan ekonomi pemerintah Soekarno yang amburadul. Rasa frustrasi dengan mudah dapat diarahkan dengan mencari target kemarahan yang

padahal sebenarnya dimiliki oleh minoritas Cina atau si Baba (pengusaha Cina yang berpengalaman dan kaya). Pola perusahaan ini digunakan untuk bisa mengelabui hukum yang membatasi kepemilikan oleh etnis Cina.

¹⁴ J.A.C. Mackie, "Anti Chinese Outbreak in Indonesia 1959-1968", dalam *The Chinese in Indonesia: Five Essays*, (Melbourne: Thomas Nelson Ltd, 1976), hlm. 82-85.

termanifestasikan dalam kerusuhan anti-Cina, dan ini adalah bagian dari pertarungan memperebutkan kekuasaan politik antara kekuatan kiri dengan kanan.¹⁵

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Pada era pemerintahan Soeharto, insiden anti-Cina terjadi di berbagai tempat meskipun tidak meluas secara serempak di banyak tempat. Kebijakan rezim Orde Baru terhadap warga Cina lebih sistematis dibandingkan kebijakan negara sebelumnya. Pemerintah berpendapat bahwa keterlibatan warga Cina dalam peristiwa September 1965 merupakan hasil dari tidak berasimilasinya warga Cina dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah meluncurkan program asimilasi yang sangat gencar. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 mengenai pelarangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang menghalangi ekspresi kehidupan sehari-hari warga Cina. Proses marginalisasi dilakukan dengan cermat. Partisipasi politik dihambat dengan berbagai alasan, termasuk dalam bidang sosial budaya.

Pada era ini terdapat pengaruh keamanan dan Departemen Agama yang kadang-kadang ikut campur dalam pelaksanaan ibadah keagamaan khususnya pada bentuk-bentuk yang lebih Cina. Dulunya acara seperti Tahun Baru Imlek, Perayaan Rebutan, atau Festival Kapal Naga adalah acara umum yang menarik penonton dan bahkan pesertanya berasal dari semua komunitas dengan disertai arak-arakan, menebar hadiah, dan membuka arak-arakan besar. Selanjutnya acara keagamaan Cina hanya dilakukan di lingkungan kelenteng atau dalam kediaman keluarga. Selain alasan ketertiban umum, pemerintah berdalih bahwa perayaan seperti Tahun Baru Imlek bukanlah perayaan agama Buda dan oleh karenanya tidak ada alasan yang kuat.¹⁶

Pemerintah melakukan asimilasi orang-orang Cina dengan memutuskan hubungan dengan leluhur dengan penggantian nama bagi WNI yang memakai nama Cina, larangan memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis barang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁶ Justian Suhandinata, *op.cit.*, hlm. 135.

cetakan dalam bahasa Cina, sekolah-sekolah Cina ditutup dan semua anak sekolah harus pindah ke pengajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Koran berbahasa Cina juga dilarang terbit. Organisasi Cina tertentu dilarang, apakah itu organisasi kaum totok seperti perhimpunan masyarakat berdasarkan tempat asal atau organisasi kaum peranakan seperti BAPERKI, sebuah organisasi untuk menggalakkan kewarganegaraan Indonesia dan membela kepentingan kaum minoritas.¹⁷

Etnis Cina kembali berkonsentrasi dalam bidang ekonomi. Bentuk ekonomi kerjasama atau ekonomi Ali-Baba pada tahun 1950-an kembali muncul pada masa pemerintahan Soeharto. Praktek bisnis seperti ini dalam era orde baru dikenal sebagai sistem *cukongisme*.¹⁸ Cukong adalah istilah Cina (*Hokkien*) yang berarti majikan. Di Indonesia istilah ini dipakai untuk menunjuk pengusaha Tionghoa yang terampil, bekerja sama secara erat dengan mereka yang berkuasa, khususnya militer sebagai perantara.

Orientasi Orde Baru pada ekonomi membutuhkan penciptaan basis investasi yang luas dan bersifat massal. Dalam hal ini yang memenuhi syarat untuk menghimpun modal hanyalah golongan etnis Cina karena lemahnya struktur modal yang dimiliki oleh para pengusaha pribumi. Pemerintah Soeharto benar-benar memberikan fasilitas dan proteksi untuk kemajuan bisnis beberapa tokoh Cina, misalnya Sudono Salim. Motif dibalik program pemerintah tersebut adalah untuk mengerahkan potensi ekonomi Cina di Indonesia dan dengan demikian mendorong mereka menarik lebih banyak modal dari Singapura, Hongkong, dan pusat-pusat bisnis Cina perantauan di Asia. Segala fasilitas pemerintah yang menguntungkan mempercepat kebangkitan kembali dominasi Cina dalam ekonomi Indonesia dan mendepak perusahaan-perusahaan pribumi.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 143.

¹⁸ A. Made Tony Supriyatna, "Bisnis dan Politik: Kapitalisme dan Golongan Tionghoa di Indonesia", dalam Lembaga Studi Realino (ed.), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 64.

¹⁹ Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 99.

Kebijakan ini dilatarbelakangi kepentingan politik dan ekonomi yang tampak sebagai upaya untuk menyangga dan melanggengkan kekuasaannya.

Sukses ekonomi warga etnis Cina pada masa Orde Baru akibat kebijakan yang diterapkan pemerintah telah melahirkan sejumlah konglomerat. Akibatnya sentimen anti-Cina muncul kembali. Misalnya pada Januari 1974 terjadi demonstrasi massa anti-Cina dan anti-Jepang.

Penutup

Warga Negara Indonesia etnis Cina telah memiliki beban sejarah dan beban mitos dalam kehidupannya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial dan otoriter telah menerapkan politik ras atas nama etnis, nasionalisme maupun pembangunan. Akibatnya muncul sentimen rasial dalam kehidupan bernegara. Sikap rasialis juga berkembang karena adanya prasangka-prasangka yang hidup dalam masyarakat, misalnya bahwa orang Cina itu hidup secara eksklusif dan memiliki sikap oportunis.

Dalam masyarakat sentimen anti-Cina didorong oleh faktor kesenjangan ekonomi. Latar belakang sejarah di bidang ekonomi warga etnis Cina telah melahirkan mitos kekuatan ekonomi mereka. Terdapat pemukulrataan bahwa semua WNI etnis Cina adalah kaya dan memperoleh akses pada kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan nasional sebagaimana dahulu mereka mendapatkan perlindungan dan keistimewaan dari pemerintah kolonial.

Referensi

A Made Tony Supriyatna, "Bisnis dan Politik: Kapitalisme dan Golongan Tionghoa di Indonesia", dalam Lembaga Studi Realino (ed.), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Ariel Heryanto, "Kapok Jadi Nonpri: Terorisme Negara dan Isu Rasial", *Kompas*, 12 Juni 1998.

Budi Susanto, SJ, "Rekayasa Kekuasaan Ekonomi (Indonesia 1800-1950): Siasat Pengusaha Tionghoa", dalam Lembaga Studi Realino (ed.), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

- Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Didi Kwartanada, "Minoritas Cina dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945", Lembaga Studi Realino (ed.), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Cina*, Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino, 1996.
- Hembing Wijayakusuma, *Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005.
- I. Wibowo, *Harga Yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Cina dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Mackie, J.A.C., "Anti Chinese Outbreak in Indonesia 1959-1968", dalam *The Chinese in Indonesia: Five Essays*, (Melbourne: Thomas Nelson Ltd, 1976), hlm. 82-85.
- Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Rene L Pattiradjawane, "Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia, dalam I. Wibowo (ed.), *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, terj. Apri Dananto, Yogyakarta: Niagara, 2004.

